

# BAB IV Penutup

Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah  
Provinsi Sulawesi Selatan  
tahun 2013

## BAB. IV PENUTUP

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai gambaran akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang sejauhmana pelaksanaan pemerintahan di daerah ini, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

Penyusunan LAKIP tahun 2013, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana muatan dokumen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja, dan alat pendorong upaya perwujudan **Good Governance** dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dokumen ini merupakan pertanggungjawaban terhadap Rencana Kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sekaligus sebagai wujud pencapaian komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2013. Tak kalah pentingnya adalah LAKIP merupakan gambaran pencapaian target-target sasaran dari setiap Agenda, Kebijakan dan Program Pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013.

Sebagai tahap lanjutan dalam pelaksanaan RPJM-D tersebut, maka dalam RKPD tahun 2013 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis pembangunan di Sulawesi Selatan dengan target kinerja masing-masing. Dalam upaya pencapaian target-target kinerja tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan 49 kebijakan yang merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dan dianggap masih perlu untuk dilanjutkan dan kebijakan baru yang harus dilaksanakan berkaitan perubahan lingkungan dan terget yang ingin dicapai. Kebijakan-kebijakan tersebut selanjut dijabarkan dalam 222 program pembangunan dan dilaksanakan melalui 2.772

kegiatan dengan alokasi anggaran dalam bentuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp. 5,64 triliun lebih.

Adapun Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam LAKIP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 ini, merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh Aparat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang akuntabel seperti apa yang diharapkan dalam **Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, nampak bahwa masih terdapat indikator sasaran yang tidak dapat diukur, hal ini disebabkan karena indikator-indikator tersebut bersifat kualitatif. Namun demikian, indikator utama yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan nampaknya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang sifatnya masih sementara, namun apa yang tergambar dari capaian sementara tersebut pada dasarnya telah dapat menggambarkan kinerja akhir tahun yang dapat dicapai.

Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan bahwa dalam periode tahun 2008 - 2013 Sulawesi Selatan menjadi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, dengan indikator utama adalah adalah laju peningkatan IPM.

Berdasarkan publikasi BPS Provinsi Sulawesi Selatan, IPM daerah ini pada tahun 2012 mencapai 72,70 dengan menempati peringkat 17 secara nasional, walaupun mengalami peningkatan jika dibanding dengan capaian IPM pada tahun 2011 sebesar 72,14 yang menempati peringkat ke 19, maka peringkat IPM daerah ini mengalami pergeseran yakni meningkat pada peringkat 17 diantara 33 provinsi di Indonesia.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah dicapai tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya sinergitas dan penajaman sasaran pembangunan, terutamanya dalam hal target-target kinerja pada masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), karena instansi inilah yang menjadi ujung tombak pencapaian target RPJMD maupun RKPD.

Upaya-upaya sinergitas tidak hanya perlu dilakukan dalam lingkup Pemerintah Provinsi, namun upaya tersebut perlu pula dilakukan dan lebih dipertegas antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten/kota yang ada di daerah ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi umpan balik bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.